

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan perkembangan, dan dimoderinisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dengan demikian, proses pembanguan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*) makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*proges*), pertumbuhan dan diversifikasi. Pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dan alam. Idonesia mulai memperkenalkan pembangunan dengan basis program dan kebijakan berada pada level desa. Alokasi anggaran serta pertanggung jawaban berada pada level desa. Dengan pembangunan berbasis desa, maka dapat dilihat pula pilihan program pembangunan yang telah secara desentralisasi, tidak saja sampai kepada level kabupaten/kota, namun sampai pada level pemerintah desa. Penelitian Ahmed Husein Allawi. 2023. Judul penelitan *A new approach towards the sustainability of urban-rural integration: The development strategy for central villages in the Abbasiya District of Iraq using GIS techniques*. Studi ini mengeksplorasi pendekatan inovatif untuk merangsang pembangunan pedesaan dengan mengusulkan berkualitas desa sebagai pusat desa yang dapat memberikan pelayanan dasar perkotaan bagi warganya dan warganya desa-desa tetangga. Pendekatan ini dapat berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di pedesaan bidang yang dihadapi pada tingkat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keberlanjutan spasial di wilayah pedesaan, mewakili pendekatan baru dengan mengintegrasikan metode pembangunan layanan perkotaan, Indikator pencapaian pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan pembangunan yang relevan.

Dalam pembangunan daerah Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian pada umumnya daerah. Selain strukturnya dominan, UMKM telah membuka lapangan kerja cukup besar, selain dari nilai tambah barang – barang dan jasa – jasa. Mengingat klasifikasi ini memerlukan inovasi, pekerja berketerampilan tinggi, dan banyak memerlukan modal kerja. Sementara UMKM, yang hampir 99% jumlahnya, masih cocok dikembangkan, karena memerlukan inovasi yang tepat dan relative mudah. UMKM relative tahan terhadap goncangan luar. Perkembangannya masih mendukung keperluan internal dan substitusi impor. Oleh karenanya mengoptimalkan UMKM menjadi salah satu tujuan dari program pembangunan daerah. Ekonomi akan lebih tumbuh lagi apabila ada sektor tertentu yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Banyak yang memperkirakan bahwa kecerdasan buatan "*artificial intelligence*" merupakan salah satu sumber penggerak pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak akan sepenuhnya menggunakan *artificial intelligence*, mengingat untuk mencapainya memerlukan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai sektor. Pilihan selain kecerdasan manusia *artificial intelligence*, Indonesia berpotensi memiliki sektor – sektor andalan lainnya. Yaitu sektor pariwisata, salah satu yang mungkin memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya. Pengembangan sektor wisata dapat meningkatkan nilai tambah untuk berbagai sektor – sektor yang mendukungnya. Sektor pendukung wisata jelas berasal dari berbagai industri kreatif, bagaimana pembentukan mempunyai nilai tambah pada perluasan lapangan kerja. Li Yanan. et al. 2024. Judul Penelitian *How has rural tourism influenced the sustainable development of traditional villages? A systematic literature review*. Wisata pedesaan telah dikenal luas sebagai sarana untuk mempromosikan kebangkitan desa adat dan telah didukung oleh banyak peneliti. Hal ini mempunyai potensi untuk memberikan keuntungan sosial dan ekonomi yang signifikan, menjadikannya strategi yang populer untuk pembangunan pedesaan baik di negara maju maupun berkembang.

Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau "*given*" melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Dimana pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, guna menganalisa suatu masalah – masalah atau kebutuhan yang harus dipenuhi, tujuan – tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai dalam setiap pembangunan yang mencakup berbagai aspek dan tatanan kehidupan masyarakat.

Secara umum membangun Indonesia dari desa adalah konteks pembangunan di Indonesia. Untuk membangun Indonesia menjadi negara yang besar, kuat, dan hebat haruslah memulai dari desa. Mayoritas warga negara di Indonesia tinggal di daerah –

daerah pedesaan. Setiap orang pasti pernah ke desa, bahkan sebagian besar bangsa Indonesia tinggal di desa – desa. Undang – undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu dan hakikat hidupnya. Setiap individu harus sadar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang mampu harus bersyukur atas hidupnya, mampu bersenang – senang, dan selalu menyenangkan bagi sesamanya. Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Dimulai dari penyadaran setiap individu akan hakikat hidup, hakikat berbangsa dan bernegara. Setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang menanam akan memanen, yang menghasilkan yang menikmati. Kebutuhan masyarakat pedesaan untuk terlibat aktif atau partisipasi dalam pembangunan dari perspektif yang lebih luas setidaknya dapat mendorong lahirnya kelompok *entrepreneurship* di desa sebagai upaya menciptakan insentif untuk bisnis usaha dan sumber daya. Menurut Syaikat dan Hendra, (2006). Konsep pengembangan sektor – sektor sumber daya lokal sebaiknya mengarah pada pengembangan ekonomi lokal yang merupakan kerjasama seluruh komponen masyarakat di suatu daerah lokal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal adalah suatu upaya bersama – sama meningkatkan produktivitas perekonomian di suatu wilayah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal demi peningkatan pendapatan masyarakat. Pengelolaan ekonomi lokal merupakan salah satu bagian dari sasaran pengembangan pedesaan (Haeruman et al, 2001), selain hal tersebut sasaran pembangunan pedesaan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan bahan pangan dan baha nlainnya untuk kegiatan produksi dan konsumsi, serta peningkatan kapasitas Lembaga atau organisasi ekonomi. Pembangunan ekonomi perdesaan diupayakan secara cermat untuk menghindari terjadinya kesenjangan kemajuan, di mana tujuannya adala mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi dan industrialisasi pedesaan. Pemberdayaan secara khusus dalam bidang ekonomi, sudah dilakukan oleh pemerintah, seiring dengan pola desentralisasi pada Undang – Undang No. 22 tahun 1999, yang sedang berkumandang, baik program secara nasional maupun program di tingkat lokal daerah.

Dan pada sisi lain, upaya melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat desa sangat penting dilakukan, baik itu dalam bentuk Pendidikan *soft skill*, *hard skill*, kewirausahaan, pengelolaan infrastruktur fisik, dan lain- lain.

Penelitian Mungmachon (2012), dengan judul “ *Knowledge and local Wisdom: Community Treasure*”. Menunjukkan bahwa Pendidikan yang berlangsung hingga saat ini masih mengabaikan pentingnya kearifan lokal sebagai akibat globalisasi yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksana Pendidikan harus mengintegrasikan kearifan lokal. Hastuti, et. al (2015) yang meneliti tentang *Local Wisdom of Economics dan Bussines Overseas Traders Minang Community in Jakarta*. Mendapatkan bahwa ekonomi kearifan lokal dan nilai bisnis berhasil diperthankan oleh pedagang minang. Setiap faktor dapat menggeser atau meningkatkan kearifan lokal. Dari nilai – nilai ekonomi dan bisnis pedagang luar negeri masyarakat dimana minang ternyata tidak menghilangkan kearifan lokalnya.

Pembangunan pedesaan dalam perpektif tersebut maka sangat penting penekanan pada aspek produksi lokal bahwa sirkulasi ekonomi mulai dari hulu hingga hilir harus terjadi di desa dan melibatkan masyarakat desa. Keberhasilan revitalisasi manusia desa sebenarnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia . Desa dan segala potensinya harus menjadi tulang punggung kemajuan perekonomian Indonesia, karena seluruh potensi ekonomi sebenarnya ada di desa – desa. Peran tenaga pendamping desa pada aspek perencanaan pembangunan desa, yaitu memahami, mengikuti, mengadministrasi, mendokemntasi, mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pembangunan desa.

Keberhasilan pembangunan di Indonesia, tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan yang ada di desa. Didalam penyusunan pembangunan di Indonesia juga berdasar pada penyusunan perencanaan pembangunan di desa melalui hasil musyawara perencanaan pembangunan desa, kecamatan pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita – cita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan desa harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa, oleh karena itu pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembanguna desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa, sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri. Dalam seminar yang dilakukan Irwansyah dan maya (2012), pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komperatif satu daerah, spesifikasi wilayah secara potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Dengan memusatkan pembangunan kearah pembangunan desa berarti melaksanakan amanat dari cita – cita kemerdekaan Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan social yang adil Makmur. Dalam upaya mempercepat perkembangan desa, pembangunan dan pembinaannya perlu mendapat perhatian semua pihak. Dengan cara ini dapat di antisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di desa. Sumber daya alam yang ada diupayakan penggunaanya secara optimal. Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan, tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa masyarakat pedesaan masih di liputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan social lainnya, perlu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Anwas (2014), mengatakan bahwa dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita – cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan UUD 1945 dan kemudian di rinci dalam pasal – pasal beserta penjelasannya. Upaya mencapai kesejahteraan dalam kemerdekaan ini tidak cukup dengan tenaga fisik, tetapi perlu denga otak, penemuan – penemuan, semangat, pengorbanan dan kerja keras yang memberi nilai tambah dan manfaat bagi rakyat banyak. Oleh karena itu diperlukan pemimpin dan penduduk yang berkualitas, mempunyai tingkat keehatan yang prima, tingkat Pendidikan yang tinggi, dan mampu bekerja keras sesuai dengan pilihannya dalam mengisi kemerdekaan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Ahmad Maulana Anshori. et al. (2022). BUMDesa memberikan peran fasilitatif dan peran teknis dalam penguatan ekonomi melalui pemberdayaan.

Mengutip dari Eddy Ch. Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan Dan Pemberdayaan (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h.24 Papilaya mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun kapasitas masyarakat melalui dorongan, motivasi, peningkatan kesadaran akan kapasitasnya dan berupaya mengembangkan kemampuan tersebut menjadi tindakan nyata

Pemberdayaan masyarakat dalam pendekatan pembangunan yang berorientasi searah dengan pradigma pendekatan pembangunan yang baru. Pendekatan pradigma yang lama bersifat top-down dan mulai di oreantasikan agar menuju bottom -up yaitu masyarakat di pedesaan sebagai pusat pembangunan. Pendekatan *top- down* tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangka ide – ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat

diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan Lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan – keputusan dan rencana – rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Eksistensi desa memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan – kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan pelembagaan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Lahirnya BUMDesa sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi dan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan – kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepannya BUMDesa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi Lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kalimantan Tengah telah mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Maksud dari kegiatan pemberdayaan BUMDesa adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan baik melalui konsolidasi atau integrasi UPK maupun LED lainnya sehingga berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa.

Pembangunan ekonomi pada masa kini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi perekonomian suatu wilayah yang dapat dilihat dari kenaikan pendapatan nasional (Nurul Huda 2015). Adapun istilah dari pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan perkembangan ekonomi terhadap negara yang sedang berkembang.

Para ahli sering berpendapat tentang istilah ini bahwa pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor perubahan-perubahan dalam struktur, karakteristik dan corak dari ekonomi (Almizan, 2016). Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah membuat masyarakat sejahtera dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, guna meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat masing-masing daerah. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Masyarakat akan sejahtera jika memiliki pendapatan yang baik. Putu Vivian Anggela 2021. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, tetapi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yuli Wantri Simarmata. 2022 dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Pendapatan berhubungan dengan masalah ekonomi dan lapangan pekerjaan, kondisi usaha, serta masalah ekonomi lainnya. Dengan pekerjaan yang baik seseorang mendapat pendapatan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan ekonomi memiliki beberapa indikator yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu; indikator ekonomi dan indikator sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berisi bahwa desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Ibrahim (2013), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di setiap desa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa yang dapat memberikan kontribusi kepada desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Selanjutnya dalam penelitian Ramadan et al (2013), menyampaikan BUMDesa sangat berkontribusi sebagai penguatan ekonomi lokal yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga bagi pendapatan asli desa.

Desa adalah unit kecil dari suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 menegaskan BUM Desa didirikan dengan tujuan antara lain agar meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa; yang semuanya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi desa. Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara Nasional. Ridlwan (2014), menyatakan bahwa UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menjadi peraturan yang konperenship tentang Desa. Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan mengenai BUM Desa dalam undang – undang Desa yang baru lebih lengkap.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 89, hasil usaha BUM Desa selain digunakan untuk pengembangan usaha BUM Desa itu sendiri, juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Alokasi dan pembagian hasil usaha BUM Desa sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUMDesa. Gunawan (2011), mengatakan bahwa untuk mengelola BUMDesa dengan baik diperlukan aktivitas manajemen. Manajemen BUMDesa menitik beratkan tata kelola BUMDesa yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Widiastuti, Y. Arumdika. 2020. Peran BUMDesa memberikan informasi bagaimana peran BUMDesa sebagai kelembagaan berhasil menjalankan usahanya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga ekonomi masyarakat desa berkelanjutan dengan memberikan kepercayaan pentingnya peran sumber daya manusia BUMDesa dan kepercayaan menentukan perkembangan BUMDesa.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan sesuai asas prinsip demokrasi ekonomi antara lain kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional sehingga demokrasi ekonomi diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan swasta. Berdasarkan realitas diatas, maka lahirlah Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUM Desa merupakan dari amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUM Desa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen dipedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadidistributor utama untuk memenuhi kebutuhan Sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang di bentuk atau didirikan pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut data dari Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun 2018, telah terbentuk lebih kurangnya 45 ribu BUMDes dari total 74.957 desa di Indonesia.

BUMDesa dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi desa bermuara dari Peran BUM Desa. Basri (2016) Penelitian Kontribusi BUMDES Dalam Pembangunan Ekonomi Desa, hasil penelitian membangun ekonomi Desa Banglas berdasarkan prinsip kebersamaan. Pemberian modal anggaran untuk Pendirian BadanUsaha MilikDesa berasal dari alokasi dan desa tersebut bertujuan untuk memacu program yang telah direncanakan Pemerintahan desa dalam mendorong tumbuhnya usaha – usaha produktif sehingga dapat menompang pertumbuhan pendapatan asli desa. Lubis Et al (2017). Melakukan penelitian berjudul *Analysisi of Ownwrrship and Stock Composition of Vocational Bussines Enterproces (BUMDesa) and its Impact on “Omset” of Bussines Owned.*

The results show ownership and composition of share of village – ownwd enterprises not signification the turnover of bussines entiries. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan dan komposisi saham BUMDesa tidak signifikan terhadap Omzet Desa.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, mengacu pada peraturan Pemerintah Negeri RI 81 Tahun 2015. Adapun pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan personilnya dari lintas sektoral berbagai dinas terkait dan perguruan tinggi juga dilibatkan. Personil yang ditunjuk sebagai pelaksana evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Dalam pasal 2 peraturan Menteri Dalam Negeri RI 81 Tahun 2015 Evaluasi Perkembangan desa dan kelurahan dimaksud adalah ; a) menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; b) mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai – nilai Pancasila. Adapun tujuan yang diharapkan adalah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan Desember.

Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Evaluasi tentang BUMDesa masuk dalam indikator bidang pemerintahan desa, evaluasi yang dilakukan terkait dengan pembentukan BUMDesa Meliputi; 1) peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa; 2) Penyertaan modal BUMDesa; 3) AD/RT; 4) Rapat pertanggung jawaban; 5) Aturan terkait dengan kepailitan; 6) Struktur organisasi BUMDesa. Keberadaan Desa yang ada Di kabupaten Barito Selatan dari data yang diperoleh dari sejumlah 6 Kecamatan dengan jumlah desa 86 yang memiliki BUMDesa ada 56 desa. Berdasarkan pengamatan dari 59 desa yang benar – benar ber operasional ada 33 BUMDesa aktif yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Pada saat tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melakukan tinjauan kelapangan ke masing – masing desa yang mewakili masing – masing kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Yang mengikuti evaluasi ternyata masih ada desa yang

ditemui oleh tim evaluasi adalah keberadaan BUMDesa hanya ada struktur program yang berjalan apa adanya, adanya struktur organisasi tapi yang hanya ada papan nama saja, srstruktur organisasi dan program tetapi administrasi belum ada atau hanya ada sekedarnya saja. Pada saat tim evaluasi ada juga menemukan keberadaan desa yang memiliki BUMDesa dimana keberadaanya tidak sesuai dengan diharapkan, dari hasil observasi awal peneliti lakukan adalah terhadap keberadaan BUMDesa di Kecamatan Dusun Selatan Terdiri dari 15 desa, ada 10 desa yang memiliki BUMDesa. Dari 10 BUMDesa yang ada di Dusun Selatan, yang aktif berjalan ada 4 BUMDesa, yaitu 1) Desa Mura Ripung BUMDesa Harapan Takam; 2) Desa Mabuan BUMDesa “Wasaha Sasameh” ; 3) Desa Danau Masura BUMDesa “Untung Mupakat” dan 4) desa Sanggu BUMDesa “Tetei Rajaki”. Saat melakukan tinjauan lapangan ke Dari 4 (empat) Desa yang memiliki BUMDesa tersebut, yang aktif dan banyaknya peran pengelolaan BUMDesa adalah Desa Sanggu, dengan nama dari BUMDesa nya adalah “Tetei Rajaki”. Dengan program di tahun 2017 pertama kali berdiri yaitu adanya program penyewaan tenda, desa wisata, pengelolaan pasar desa dan jasa angkutan. Desa sanggu adalah desa yang sangat indah dan kaya akan hasil hutan seperti tanaman dan madu, sehingga masyarakat disana menjaga dan melestarikan hasil hutan yang ada, dan ini membuat para masyarakat ber inisiatif membangun sebuah wisata di desa sanggu tersebut. Sehingga banyak aktivitas – aktivitas masyarakat di desa tersebut.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara bertahap telah melaksanakan program - program dibidang Penataan BUMDesa ada beberapa Desa yang sudah mendirikan BUMDesa dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakatnya dan dapat membantu perekonomian di desa mereka namun pada keterbatasan dana sehingga belum semua desa yang dapat mendirikan BUM Desa dan ada beberapa Desa yang berpotensi untuk berkembang melalui BUMDesa dan semangat mereka begitu tinggi tetapi belum semuanya tercapai dan dapat direalisasikan karena terkendala penyertaan modal sementara dari dana Desa masih teralokasi untuk pembiayaan yang lain. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Selatan dari 59 Bum Desa yang aktif menjadi 33 Bum Desa (data : periode oktober 2021). BUMDesa sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya menjadi pemahaman di kalangan pegiatan ekonomi lokal dan rakyat desa. Juga BUMDesa yang ada di tiap – tiap desa, harus bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayahnya masing – masing. Di harapkan sebagian Pemerintahan desa yang mendirikan BUMDesa, harus terlebih dahulu melihat potensi dan kebutuhan prioritas masyarakat di desanya. Jika tidak melihat potensi SDA dan lainnya yang ada di desa, maka BUMDesa yang dibangu

tidak akan bisa ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Untuk itulah meminta kepada pemerintah desa sebelum mendirikan BUMDesa terlebih dahulu melihat potensi Sumber Daya Alam maupun potensi lainnya yang ada didesanya masing – masing yang bisa dikembangkan dan diperlukan masyarakat. Dengan contoh seperti pada suatu desa yang memiliki potensi hasil pertanian dan perkebunan, maka sangat diperlukan BUMDesa dalam bidang usaha pupuk dan obat – obatan pertanian. BUMDesa yang didirikan juga bisa menampung hasil pertanian untuk selanjutnya dipasarkan, sehingga keberadaannya dapat membantu masyarakat desanya. Selain itu, kepala desa bersama aparturnya yang ada di desa tersbut agar kiranya betul – betul dalam mengelola BUMDesa, sehingga bisa berjalan dengan baik guna memajukan desanya. Dengan adanya potensi – potensi yang ada di desa, seperti sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dan bidang lainnya yang jika didukung oleh BUMDesa, maka sektor tersebut akan bisa semakin maju. Demikian halnya dengan potensi lainnya yang apabila dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya peran BUMDesa ini membantu masyarakat secara otomatis akan mengalami kemajuan dan berjalan sesuai dengan harapan bersama masyarakat di desa.

BUMDesa Tetei Rajaki berperan dalam program untuk kemajuan ekonomi di Desa Sanggu, dikarenakan masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah desa dalam segi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan adanya segi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan adanya lembaga BUMDesa yang dimana pengelolaanya diperuntukkan bagi masyarakat karena adanya sumber alam yang berlimpah dan sumberdaya manusia membantu dalam pertumbuhan masyarakat desa agar lebih maju kedepannya dan untuk kemajuan BUMDesa itu sendiri tidak luput ikut serta berperan guna kelancaran dan kemajuan BUMDesa itu sendiri. Adapun kegiatan kerjasama BUMDesa Tetei Rajaki yaitu dari kegiatan wisata yang berkejasama dengan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan susur sungainya, kegiatan Produksi madu hutan, Pembudidayaan macam – macam bunga Anggrek. Pengelolaan sampah masyarakat desa, pengadaan pasar desa, serta penyediaan distribusi gas elpiji. Dengan adanya keberadaan BUMDesa Tetei Rajaki dapat memberikan strategi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di desa sanggu dalam membantu menghidupkan dan mengembangkan sektor – sektor usaha ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan aktifitas BUMDesa tersebut. Dari sektor wisata dimana di desa sanggu banyak tempat yang dimana luas tanah bisa dijadikan tempat wisata, dengan diprakarsai BUMDesa dan dikelola masyarakat memberikan kesempatan untuk mempromosikan keterlibatan aktif dalam mengelola wisata dengan platform publik desa sanggu, ini menjadi tantangan masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan

sumber daya alamnya. Dengan adanya hutan yang asri maka desa sanggu banyak menghasilkan madu hutan yang berkualitas ini berperan pada masyarakat mengelola madu baik dalam pemberdayaannya dan pemasarannya, tumbuhan anggrek juga banyak macam – macamnya tumbuh disana yang terkenal adalah anggrek hitam kalimantan. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang peduli akan lingkungannya, lingkungan yang sehat menciptakan tempat yang nyaman, di sini BUMDesa ikut mengelola pengelolaan sampah agar sampah tidak bereserakan dimana mana. Membantu masyarakat agar tidak jauh sampai keluar desa untuk belanja kesehariannya BUMDesa berperan dalam membuat pasar di desa sanggu tersebut.

Akhirnya BUMDesa seharusnya menjadi modal awal gerakan sosial dari pertarungan ”ekonomi” belum tercapai secara maksimal. Kesadaran masyarakat desa untuk memahami posisi mereka dalam rangka merebut desa menjadi sentral ekonomi belum menjadi sebuah tujuan. Dengan adanya BUMDesa bisa diharapkan meningkatkan perekonomian desa sanggu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan keberadaan BUMDesa Tetei Rajaki masih berperan menjalankan aktivitas perekonomian yang mempunyai nilai guna pendapatan ekonomi berkelanjutan yang mempunyai keunggulan tersendiri sehingga menjadi unik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Dari masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BUMDesa Tetei Rajaki dalam mengembangkan aktivitas ekonomi produktif dan new income generating bagi masyarakat Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan?
2. Bagaimanakah kesejahteraan masyarakat Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan adanya Peran BUMDesa Tetei Rajaki?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengamati dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan aktivitas ekonomi produktif dan income generating di Desa Sanggu. Dalam menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa pada perkembangan ekonomi masyarakat melalui tahapan berikut :

1. Menganalisis peran BUMDesa Tetei Rajaki dalam mengembangkan aktivitas ekonomi produktif dan new income generating bagi masyarakat Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan
2. Menganalisis perkembangan aktivitas ekonomi dan pendapatan baru masyarakat Desa Sanggu kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat antara lain:

1. Bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan. Dapat menambah data dan informasi tentang pengelolaan BUMDesa untuk mensejahterakan Masyarakat
2. Bagi BUMDesa sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan peran BUMDesa di Kabupaten Barito Selatan. Upaya mempercepat pembangunan desa dan perkembangan perekonomian.
3. Bagi kelompok masyarakat desa dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya manusia dan alam dalam pengelolaan agar ekonomi memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.
4. Bagi Akademis bermanfaat dalam menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus dapat menambah wawasan dalam bidang Pembangunan Ekonomi terutama dalam hal yang berkaitan dengan perkembangan per ekonomian.